



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**  
Jalan Karya Bhakti No. 54 Pasir Mas, Telp (0511) 3352543, Banjarmasin



# **RENCANA KERJA (RENJA)**

## **TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**

**TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan pada tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja yang disusun ini merupakan acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin yang telah melakukan upaya-upaya perencanaan, pembangunan sarana dan fasilitas pendukung serta penataan diantaranya :

- Perencanaan Angkutan Umum dan Angkutan Pelajar
- Pembangunan sarana dan fasilitas pendukung terminal dan pelabuhan
- Penataan Perparkiran pada badan jalan
- Pemeliharaan PJU dan PJJ
- Pembinaan dan Pengawasan pada setiap sektor

Untuk Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan tersebut diatas dapat diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan, dalam kaitan ini upaya yang mengarah kepada pementapan koordinasi perencanaan pembangunan Kota Banjarmasin secara komprehensif dan integral perlu mendapatkan prioritas dalam upaya mendorong percepatan pembangunan sehingga terjadi perubahan yang fundamental di segala bidang.

Upaya mewujudkan sistem transportasi nasional yang berkelanjutan, dibutuhkan pengembangan sistem transportasi secara sistematis dan berkelanjutan dari tahun ketahun.

Kami menyadari bahwa materi yang disajikan dalam Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu kepada semua pihak yang memanfaatkan Rencana Kerja ini hendaknya memberikan masukan dan saran yang konstruktif, yang mana mengingat dimasa-masa yang akan datang perubahan-perubahan terus akan terjadi, maka Rencana Kerja ini masih diperlukan perbaikan-perbaikan.

Akhirnya kepada semua pihak terkait yang telah turut memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini kami mengucapkan terimakasih.

Banjarmasin,      November 2023.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARMASIN,

**H. SLAMET BEGJO, A.TD, MT**  
NIP. 19670119 199203 1 006

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	4
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022</b>	<b>9</b>
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .....	17
2.3 Isu Isu strategis .....	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	57
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN SKPD</b>	<b>63</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	63
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .....	63
3.3 Program dan Kegiatan .....	63
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN</b>	<b>88</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>106</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Renstra Tahun 2021 – 2026. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi Pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD), Karenanya sebagai Dokumen perencanaan Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan dalam menata, mengatur kelancaran, keamanan, ketertiban lalu lintas di jalan dan di sungai serta pengendalian manajemen operasional angkutan baik di jalan maupun di sungai.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas perhubungan Kota Banjarmasin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024. Dokumen Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJM dan RKPD Kota Banjarmasin serta Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin 2022-2026.

Penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahapan perumusan Rencana Kerja SKPD.

Perumusan Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan SKPD;

- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
  - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
  - e. Telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD;
  - f. Perumusan tujuan dan sasaran;
  - g. Perumusan kegiatan prioritas;
  - h. Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
  - i. Penyempurnaan rancangan Renja SKPD;
  - j. Pembahasan forum SKPD;
  - k. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan, tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
2. Tahap penyajian Renja SKPD.

Tahap penyajian Renja SKPD terdiri dari susunan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- b. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu yang terdiri dari evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- c. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang terdiri dari telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan.
- d. Penutup

## **1.2. Landasan Hukum**

Dasar Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- 1.2.1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.2. Undang undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 1.2.3. Undangundang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(SPPN);
- 1.2.4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 1.2.8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.
- 1.2.9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4737);
- 1.2.10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/200/II/BANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 1.2.11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- 1.2.12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
- 1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 1.2.14. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.15. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 1.2.16. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 18);
- 1.2.17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 1.2.18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran daerah kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan lembaran daerah kota Banjarmasin nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas peraturan daerah kota Banjarmasin nomot 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah;

- 1.2.19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, tambahan Daerah Nomor 10);
- 1.2.20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin;
- 1.2.21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
- 1.2.22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016-2021 (Lembaran daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
- 1.2.23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025;
- 1.2.24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah kota Banjarmasin (lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016;
- 1.2.25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2016-2021;
- 1.2.27. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 77 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- 1.2.28. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 117 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin;
- 1.2.29. Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja 2024 adalah :

- a. Pedoman dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2024.
- b. Menyediakan sarana pengendalian dalam pelaksanaan Program / Kegiatan Dinas Tahun 2024
- c. Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan dalam satu tahun secara efektif dan efisien.
- d. Mempertajam prioritas pembangunan seiring dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai hasil secara optimal.
- e. Menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Bajarmasin Tahun 2024, adalah memuat visi, misi, tujuan , strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
  - 2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan Capaian Analisis Kinerja
  - 2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan
  - 2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan
  - 2.1.4. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja target program / kegiatan
  - 2.1.5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.3.1. Identifikasi Permasalahan
  - 2.3.2. Telaahan dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Walikota



2.3.3. Telaahan Renstra

2.3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN, SASARAN SKPD**

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan Kegiatan

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN 2022**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi kepada masyarakat Kota Banjarmasin yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi, Komunikasi dan Informasi serta penataan perparkiran pada badan jalan yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang sangat terbatas, namun program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

Dinas Perhubungan juga merupakan penghasil PAD untuk Kota Banjarmasin dalam Pelayanan parkir, pelayanan terminal, pelayanan kepelabuhanan dan pelayanan pengujian kendaraan Bermotor.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Rencana Kerja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin selama tahun 2022 dan prakiraan target Tahun 2023.

##### **2.1.1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan**

- a. Program Penyelenggaran lalu lintas dan angkutan jalan (LLAj)
  1. Kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota sub kegiatan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Target 2 Koridor Realisasi 0 Koridor atau 0%
  2. Kegiatan Pengelolaan terminal penumpang tipe C sub kegiatan Penyusunan rancangan pembangunan terminal penumpang tipe C target 4 dokumen realisasi 3 dokumen atau 75%

**2.1.2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan**

- a. Program Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAj)
  1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAj Kabupaten/Kota
  2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
  3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  5. Pelaksanaan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
  6. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
  2. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah
  3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
  4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

**2.1.3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja/Hasil keluaran yang direncanakan**

- a. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
  1. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

**2.1.4. Faktor-faktor tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja target program / kegiatan adalah karena :**

- a. Tidak ada anggaran untuk penambahan koridor pada kegiatan Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota
- b. penyusunan dokumen penilai lahan tidak bisa diolah sehingga proses pengadaan tanah belum dapat dilakukan dikarenakan belum adanya kesepakatan dengan warga

### **Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah**

Implementasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian program Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Terhadap program yang realisasinya telah mencapai target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran khususnya dan kepada Masyarakat pada umumnya.
- b. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin berdampak pada Laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
- c. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam RENSTRA.
- d. Para PPTK dalam membuat perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan.

### **Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.**

- a. Merencanakan dan menganggarkan pada tahun berikutnya untuk pengadaan armada angkutan dan koridor.
- b. Membuka forum komunikasi serta mengikutkan pihak pihak terkait untuk menyepakati terkait penghamb at pembangunan.
- c. Menambah sumber daya yang professional
- d. Diberikan perjanjian penyelesaian pekerjaan 50 hari melewati tahun anggaran. Dan dibayar pada APBD Tahun berikutnya dengan dikenakan dendaketerlambatan.

**Tabel T.C. 29**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan**  
**Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output	Target kinerja Capaian sasaran / program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021	Target dan realisasi kinerja dan program dan kegiatan tahun 2022 (n- 1)			Target Program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun n-2 (2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD n-1 (2022)	Realisasi Renja SKPD n-1 (2022)	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n- 1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAj)	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan lalu lintas	%            100							
		Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 10.000	Rasio        0							

		keberangkatan									
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi	Nilai	85							
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dok	10	0	1	1	100	2	3	30
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit	4	0	2	2	100	1	3	75
		Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	ID Panel	1.480	0	296	295	99,66	296	591	39,93
		Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	8	0	2	2	100	2	4	50
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit	400	0	100	100	100	100	200	50
		Jumlah Gedung Terminal yang	Unit	2	0	0	0	0	1	1	50
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya dokumen perencanaan terminal tipe C	Dok	5	0	3	3	100	1	4	80
		Jumlah Gedung Terminal yang	Unit	2	0	0	0	0	1	1	50

		Terbangun								
		Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	Unit 5	1	0	0	0	1	2	40
		Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan dipelihara	Unit 6	1	1	1	100	1	3	50
2.1502.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan 4500	0	900	900	100	900	1800	40
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit 6	1	1	1	100	1	3	50
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan 12	0	0	0	100	3	3	25

		Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Unit	480	0	0	0	100	120	120	25
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan	60	0	12	12	100	12	24	40
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	Dok	12	0	4	4	100	4	8	66,67
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit	100	12	8	8	100	20	40	40
			Trayek	9	3	2	0	100	1	4	44,44



		Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	68	20	20	20	100	12	52	76,47
			Kegiatan	1104	144	240	240	100	240	624	56,52
2.15.03	Program Pengelolaan Pelayaran	Terlaksananya Pengelolaan Pelayaran (%)	Persen	100	15,38%	20%	23,08%	115%	20%	58%	58%
2.15.03.2.13	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit	13	2	3	3	100	1	6	46,15

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

Pelayanan transportasi dan penataan perparkiran di Kota Banjarmasin masih mengalami berbagai permasalahan baik dari segi proses, substansi, pelaksanaan dan pengawasannya. Hal ini disebabkan masih kurangnya aparatur pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, dari segi kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya legalitas yang mendukung pelaksanaan lapangan, belum diaturnya petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis) atas perubahan beberapa peraturan perundangan di tingkat nasional yang mengatur tentang Perhubungan, belum adanya layanan transportasi yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara berlalu lintas dan belum optimalnya Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin sebagai salah satu pelaksana pelayanan dibidang transportasi dan angkutan.

Namun demikian, pelayanan transportasi yang dilakukan selama ini juga memberikan hasil yang positif, antara lain : semakin baiknya prasarana lalu lintas, semakin meningkatnya komitmen untuk tertib berlalu lintas dan berubahnya pola pikir masyarakat Kota Banjarmasin dalam mendukung tertib lalu lintas.

Untuk melaksanakan fungsi dan memberikan hasil yang positif kepada masyarakat Kota Banjarmasin, Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin mempunyai wewenang, yaitu :

- Pengoptimalan Pengaturan dan pengendalian lalu lintas
- Meningkatkan disiplin berlalu lintas
- Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan
- Dilakukan pengawasan terhadap kapal penumpang, barang, dan penyeberangan diwilayah perairan
- Pembenahan keselamatan dan keamanan penumpang yang menggunakan transportasi sungai guna menekan kecelakaan kapal angkutan penumpang menuju zero accident
- Menjaga/memelihara alur pelayaran terhadap hambatan sungai
- Melakukan pemeliharaan rutin dermaga beserta fasilitas nya dan pembangunan dermaga beserta fasilitasnya
- Pengembangan dan penambahan sarana transportasi sungai
- Penambahan shelter transportasi sungai
- Keterkaitan dan keterpaduan transportasi sungai dan darat
- Penguatan dan supervisi dalam hal pembinaan dan pengawasan operasional pelayanan serta keselamatan ASDP
- Dilakukannya pengawasan terhadap penyelenggaraan angkutan kota
- Pengembangan dan penambahan serta pembenahan sarana dan prasarana angkutan jalan

- Dilaksanakannya pelayanan angkutan pelajar ceria
- Peningkatan pelayanan angkutan melalui pemberian bimbingan penyelenggaraan pengangkutan
- Dilaksanakannya Angkutan Umum BRT
- Pengumpul PAD.

**Tabel T-C.30.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**  
**Kota Banjarmasin**

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun n -2	Tahun n -1	Tahun n	Tahun n +1	Tahun n -2	Tahun n -1	Tahun n	Tahun n +1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kecelakaan angkutan umum	-	0	0	0	0	0	0	0			
2	Jumlah keberangkatan angkutan umum	-	51.100	50.000	50.000	50.000	80.000	50.560	50.890	50.000	50.000	
3	Jumlah Koridor yang dilayani	-	3	1	2	1	2	1	0	1	2	
4	Pelabuhan yang terkoneksi dengan angkutan umum	-	0	0	3	4	5	3	6	4	5	
5	Fasilitas Dermaga yang terbangun	-	0	0	4	5	6	4	2	5	6	

## 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

### 2.3.1 Identifikasi Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, menemui berbagai permasalahan diantaranya adalah:

- a. Keamanan dan kelancaran lalu lintas di Kota Banjarmasin.
- b. Penataan dan penertiban parkir
- c. Semakin rendahnya penggunaan moda transportasi sungai di Kota Banjarmasin;
- d. Masih rendahnya penggunaan angkutan umum di kota Banjarmasin

### 2.3.2 Telaahan dan keterkaitan dengan Visi dan Misi Walikota

Visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 adalah

**”Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat”.**

Untuk mewujudkan visi Kota Banjarmasin 2021 – 2026 tersebut, maka dijabarkan dalam 6 Misi yang menjadi pedoman pembangunan Kota Banjarmasin, yaitu :

1. Meningkatkan daya saing usaha ekonomi lokal, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi digital serta penguatan industry dan sarana distribusi perdagangan;
2. Meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Memperkuat ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat;
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan;
5. Mengembangkan pariwisata berbasis sungai dan memperkuat nilai budaya banjar dalam sendi kehidupan masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

Dari enam misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah misi : **” Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan raung dan lingkungan “.**

Dalam usaha mewujudkan visi misi Walikota dan Wakil Walikota Banjarmasin tersebut tentunya ada faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi

capaian visi misi tersebut. Faktor tersebut bisa berasal dari luar (eksternal) maupun dalam (internal).

**a. Faktor Internal**

- Tingkat apresiasi masyarakat terhadap tertib berlalu lintas yang masih kurang.
- Masih kurangnya Sarana dan Prasarana jalan maupun di sungai.
- Anggaran yang belum maksimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan yang dikelola dengan baik.
- Masih ada beberapa sungai yang sulit untuk dilalui transportasi.

**b. Faktor Eksternal**

- Perkembangan penduduk diluar Kota Banjarmasin yang bekerja maupun beraktifitas di kota Banjarmasin akan menyebabkan perkembangan kendaraan bermotor yang cukup pesat.
- Kemacetan lalu lintas di Kota Banjarmasin yang semakin memprihatinkan terutama pada ruas-ruas jalan tertentu yang sudah mencapai indek tingkat pelayanan (ITP) E yang menunjukkan bahwa kinerja ruas jalan mendekati macet total;
- Kondisi angkutan kota yang ada di Kota Banjarmasin cukup memprihatinkan.
- Pengelolaan transportasi sungai di Kota Banjarmasin yang semakin kecil.

**2.3.3 Telaahan Renstra**

Dalam pelaksanaan Renstra, ada faktor penghambat ataupun faktor pendorong baik dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yaitu :

**1. Faktor Internal**

- Belum Optimalnya menejemen dan rekayasa lalu lintas.
- Belum optimal penggunaan sarana transportasi sungai terkait kapasitas penumpang dan barang.
- Terganggunya alur transportasi Sungai di wilayah perairan Kota Banjarmasin.
- Rendahnya kualitas fasilitas dermaga angkutan sungai serta kesinambungan antar moda transportasi.
- Belum optimalnya pelayanan angkutan kota.
- Masih adanya pelanggaran yang dilakukan awak kendaraan umum.

- Belum adanya penyajian data mengenai masalah transportasi darat maupun sungai secara berbasis teknologi informatika

## 2. Faktor Eksternal

- Perkembangan penduduk diluar kota Banjarmasin yang bekerja maupun beraktifitas di kota Banjarmasin akan menyebabkan perkembangan kendaraan bermotor yang cukup pesat.
- Menciptakan iklim yang mendorong dan meningkatkan peran serta sektor swasta dalam penyelenggaraan jasa transportasi.
- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam ketertiban berlalu lintas di jalan.
- Mendorong kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa transportasi berwawasan sungai.

### 2.3.4 Penentuan Isu – Isu Strategis

- Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur yang menunjang kelestarian lingkungan.
- Pembangunan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan
- Reformasi Birokrasi (Sistem dan Aparatur) berbasis teknologi dan informasi (sistem daring/online dan smart governance) yang terintegrasi dengan supra sistemnya untuk mendukung kinerja tinggi sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang optimal

## 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

### **Perkiraan Pencapaian Kinerja Tahun 2024**

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga periode RPJMD 2021 – 2026. Berbagai indikator pelayanan SKPD yang telah ditetapkan dalam Renstra akan menjadi tolak ukur pencapaian fungsi pelayanan SKPD. Anggaran 2024 yang akan ditetapkan bulan Desember 2023 dan efektif berlaku Januari 2024

Perkiraan pencapaian kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kemampuan keuangan, SDM dan SKPD. Melalui proses perencanaan yang matang, program/kegiatan yang akan dilaksanakan dapat direncanakan progress pelaksanaannya sampai berakhirnya tahun anggaran.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin pada Renstra 2021 – 2026 menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis, 5 (Lima ) indikator kinerja

Pada tahun 2024, sesuai dengan Pohon Kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menetapkan 5 (Lima) Sasaran Strategis Perkiraan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Sasaran 1 : Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Program & Kegiatan
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
1	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Rasio kecelakaan lalu lintas per 10.000 keberangkatan	Persen	0	0	0	0	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</li> <li>• Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>• Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</li> <li>• Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</li> <li>• Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</li> <li>• Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</li> </ul>



**Sasaran 2 : Meningkatnya Konektifitas Kota**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Program & Kegiatan
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
2	Meningkatnya Konektifitas Kota	Rasio Konektifitas Kota	Persen	0	5	10	15	<b>Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</li> <li>• Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</li> </ul>

**Sasaran 3 : Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter angkutan umum**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Program & Kegiatan
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
3	Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter angkutan umum	Persentase Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter angkutan umum	Persen	0	0	4	10	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</li> </ul>

**Sasaran 4 : Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Program & Kegiatan
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
4	Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan	Persentase Dermaga/Pelabuhan Sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan	Persen	0	0	4	10	<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</li> </ul>

**Sasaran 5 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Triwulan				Program & Kegiatan
				1	2	3	4	
1	2	3	4	5				6
5	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD	Nilai LHE AKIP	Persen	0	0	0	74,71 (BB) (0,15)	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>• Administrasi Kepegawaian</li> </ul>

								Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
--	--	--	--	--	--	--	--	---

**Tabel T-C.31.**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024**  
**Kota Banjarmasin**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capa	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	BJM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85	60.421.564.038	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	BJM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	85	79.163.453.822	
			Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%				Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	100%		

			<b>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan</b>	<b>0</b>				<b>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan</b>	<b>0</b>		
	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kot</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>342.672.000</b>	
	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2 Dok	90.000.000	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten /Kota	2 Dok	342.672.000	Harga satuan untuk pembuatan dokumen
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>26.000.000.000</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>33.570.974.009</b>	

			<b>Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu</b>	<b>100%</b>		
			<b>Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang</b>	<b>100%</b>				<b>Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang</b>	<b>100%</b>		
	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	22.000.000.000	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	1 Unit	22.857.404.656	Belanja tagihan listrik penerangan jalan penerangan jalan, pemasangan APJ baru + pembangunan
			Kwh Penerangan Jalan yang dibayarkan	296 ID Panel				Kwh Penerangan Jalan yang	296 ID Panel		

								dibayarkan			gedung Baru UPTD PJU
			Titik Lampu yang dipasang dan ditingkatkan	160 Titik				Titik Lampu yang dipasang dan ditingkatkan	160 Titik		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	BJM	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	BJM	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	6.213.622.253	Penambahan jumlah APJ yg dipelihara dan ditingkatkan
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	BJM	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	2.000.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	BJM	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100 Unit	4.499.947.100	Penambahan Marka Jalan
	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe.C</b>	<b>BJM</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan</b>	<b>100%</b>	<b>8.253.564.038</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe.C</b>	<b>BJM</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan</b>	<b>100%</b>	<b>4.605.968.217</b>	

			<b>Terintegrasi</b>					<b>Terintegrasi</b>			
	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	Jumlah terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	800.000.000	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	Jumlah terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	3.537.622.617	
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	BJM	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	6.673.564.098	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	BJM	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun (Fasilitas Utama dan Penunjang)	1 Unit	328.200.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi dan dipelihara	1 Unit	780.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang Direhabilitasi	1 Unit	740.145.600	



								dan dipelihara			
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>BJM</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan Parkir</b>	<b>25</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>BJM</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan Parkir</b>	<b>25</b>	<b>2.438.846.100</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	900 Laporan	2.000.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	2.438.846.100	Penambahan Mobil patroli UPTD ParkirKaroseri 1,1 dan Kendaraan/Motor patrol 8 unit 407.500.000

	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>BJM</b>	<b>Persentase pengujian kendaraan bermotor yang dipelihara</b>	<b>98%</b>	<b>1.590.000.000</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>BJM</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi</b>	<b>88%</b>	<b>6.511.085.692</b>	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	480.000.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	4.402.452.522	Pengadaan Alat Ketuk Uji
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Orang	60.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	24 Orang	437.095.200	Gaji dan BPJS

	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11700 Unit	30.000.000	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	11.700 Unit	54.020.000	
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	23400 Dokumen	150.000.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dok	149.990.400	Stock klartu uji (Smart card) habis
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4800 Laporan	60.000.000	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	3.840 Laporan	354.788.000	OP Non ASN

								Bermotor			
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	BJM	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	120 Laporan	60.000.000	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	BJM	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	1 Laporan	50.000.000	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	360.000.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	1 Unit	1.038.155.570	Kalibrasi, Pemeliharaan kalibrasi, Pengerukan halamam
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	30.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian	10 Laporan	24.584.000	

								Berkala Kendaraan Bermotor			
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		0	
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	360.000.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggara an Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	20 Laporan	0	
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan</b>	<b>100%</b>	<b>8.170.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpeliharanya fasilitas perlengkapan</b>	<b>100%</b>	<b>16.589.336.100</b>	

	<b>untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>di Kota Banjarmasin</b>			<b>Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>jalan di Kota Banjarmasin</b>			
			<b>Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>				<b>Terselenggaran ya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>		
			<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>100%</b>				<b>Terselenggaran ya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>100%</b>		
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	BJM	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk	12 Laporan	5.070.000.000	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan	BJM	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas	12 Laporan	5.705.061.900	Penambahan gaji honorer dan Op (437 jt)

	Kabupaten/Kota		Jalan Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota			
	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	10 Dok	500.000.000	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	10 Dok	1.723.860.000	Penambahan sosialisasi, target indikator 48 kegiatan
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9 Laporan	100.000.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan	9 Laporan	169.418.000	Indikator 24 kegiatan

								Jalan Kabupaten/ Kota			
	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	BJM	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	120 Unit	2.000.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	BJM	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	120 Unit	8.490.996.200	Pembangunan Gedung tahap 2 Gedung cc room, ATCS 2 unit, spped bam, cermin tikungan
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3 Laporan	500.000.000	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/	3 Laporan	500.000.000	



								Kota			
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>18.000.000</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>100%</b>	<b>205.770.000</b>	
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	BJM	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	BJM	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan		0	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	12.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	BJM	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	10 Laporan	99.730.000	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai dampak pembangunan yang diterbitkan

											oleh pemerintah kota Bjm
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	BJM	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	10 Laporan	6.000.000	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	BJM	Jumlah Laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang Terawasi	10 Laporan	106.040.000	Melakukan evaluasi kebijakan dari rekomendasi andalalin yang diterbitkan di kota BJM
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BJM	Rasio Konektivitas Kota	38,46%	14.300.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BJM	Rasio Konektivitas Kota	38,46%	14.898.801.701	
			Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	2 Trayek				Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	2 Trayek		

	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.300.000.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan	1.848.668.805	Penambahan Gps Tracer untuk control, kamera penghitung penumpang, MDVR (perekam video digital ke disk drive, USB flash drive, kartu memory SD atau perangkat penyimpanan massal atau jaringan, 1 set alat untuk mendistribusikan ke cc room)
--	---	-----	--	------------	---------------	---	-----	--	------------	---------------	--

	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	20 Unit	13.000.000.000	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	BJM	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Tersedia	20 Unit	13.050.132.899	Penambahan BUS 10 UNIT @1,3M. Operasional bmm, Driver, penambahan kondektur (penarik karcis) e-money tetep jalan.
B	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	BJM	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	100%	18.400.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	BJM	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	100%	11.904.079.780	
			Persentase dermaga/pelabuhan					Persentase dermaga/pela			

			sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum (%)					buan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum (%)			
	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	BJM	<b>Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>100%</b>	<b>18.400.000.000</b>	<b>Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	BJM	<b>Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>100%</b>	<b>11.904.079.780</b>	
	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	BJM	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	3 Unit	11.000.000.000	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	BJM	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	3 Unit	4.125.544.000	
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai	BJM	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan	3 Unit	600.000.000	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai	BJM	Jumlah Pelabuhan Sungai dan	3 Unit	1.402.649.680	

	dan Danau		Terpelihara			dan Danau		Danau yang Beroperasi dan Terpelihara			
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	BJM	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	6.800.000.000	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	BJM	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Laporan	6.375.886.100	
C	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BJM	Nilai LHE AKIP	BB	19.383.353.868	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BJM	Nilai LHE AKIP	BB	21.346.910.936	
			Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%				Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)	Sangat Baik				Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi	Sangat Baik		

								kesekretariatan (kategori)			
			Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik				Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)	Sangat Baik		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>28.769.047</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>33.887.500</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BJM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	21.097.301	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BJM	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dok	24.892.500	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BJM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	7.671.746	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BJM	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	12 Laporan	8.995.000	

								Perangkat Daerah			
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>14.884.167.908</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>11.412.000.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BJM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	14.872.660.289	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BJM	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	11.400.000.000	
	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BJM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	11.507.619	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	BJM	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dok	12.000.000	
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>41.529.863</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat</b>	<b>BJM</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik</b>	<b>100%</b>	<b>19.596.200</b>	



						Daerah		Daerah			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	24.094.077	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	0	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	17.435.786	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok	19.596.200	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>183.472.024</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>100%</b>	<b>441.620.000</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BJM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	166.432.505	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	BJM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	141.620.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	BJM	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	25 Orang	17.039.518	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	BJM	Jumlah Pegawai Berdasarkan	25 Orang	300.000.000	

	dan Fungsi		Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			berdasarkan Tugas dan Fungsi		Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.011.291.453</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.486.220.836</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BJM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	23.974.206	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BJM	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.925.000	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BJM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	158.507.148	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	BJM	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2 Paket	0	

								Disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BJM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	19.179.365	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	BJM	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	89.545.936	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BJM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	119.871.030	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BJM	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	902.826.400	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BJM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	19.179.365	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	BJM	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	97.463.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BJM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang	4 Dok	11.507.619	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BJM	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-	4 Dok	10.980.000	

			Disediakan					Undangan yang Disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BJM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	83.691.774	Fasilitasi Kunjungan Tamu	BJM	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	102.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BJM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	575.380.946	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BJM	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.257.980.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>465.218.479</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	BJM	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>870.257.800</b>	

	Pengadaan Mebel	BJM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	17.435.786	Pengadaan Mebel	BJM	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	21.164.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BJM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	83.216.253	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BJM	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	395.272.800	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	277.387.509	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	108.680.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.589.466	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	43.589.466	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	345.141.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.040.384.648</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>2.369.136.000</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BJM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	714.431.342	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BJM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	733.200.000	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BJM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	325.953.306	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BJM	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.635.936.000	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.728.520.446</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.714.192.600</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BJM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	479.484.122	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	BJM	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	7 Unit	99.786.600	

						Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BJM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	719.226.183	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BJM	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit	2.736.480.000	
	Pemeliharaan Mebel	BJM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	8.717.893	Pemeliharaan Mebel	BJM	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BJM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	43.589.466	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	BJM	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	130 Unit	119.750.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	BJM	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	239.742.061	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung	BJM	Jumlah Gedung Kantor dan	2 Unit	251.888.000	



	dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			Kantor dan Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang pelihara /Direhabilitasi	3 Unit	158.507.148	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	3 Unit	251.888.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	79.253.574	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BJM	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1 Unit	254.400.000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Prgram dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menyelenggarakan rangkaian mekanisme perencanaan pembangunan, salah satunya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur yang menunjang Kelestarian Lingkungan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui forum konsultasi yang dilaksanakan secara terbuka dengan mengundang para pemangku kepentingan utama yang terdiri dari unsur akademis/ perguruan tinggi, LSM, Aspirasi Masyarakat dan SKPD di Kota Banjarmasin.

Pedoman teknis usulan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

NO	MENU USULAN ASPIRASI MASYARAKAT	PERSYARATAN TEKNIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	Pemasangan Penerangan Jalan Umum	Proposal dari Ketua RT dengan melampirkan : 1. Alamat Lengkap 2. Denah Titik Lokasi 3. Foto Lokasi 4. Jumlah Titik Lampu 5. Nomor Telepon	Program : Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Kegiatan : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Dalam hal ini, Usulan dari masyarakat yang melalui Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tidak ada. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah berikut :

**Tabel T-C.32.**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024**  
**Kota Banjarmasin**  
**Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**

No	Program/ kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / volume	catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Pengelolaan Pelayaran/Kegiatan	Depan Musholla Al-	Terlaksananya	1 Buah	Sarana Transportasi

	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau - Pembangunan Dermaga	Qomar RT.02 RW.01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Komplek Andai Jaya Persada Blok D,E,F,G,H RT 34,35 dan 36 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	8 Buah	Untuk memantau dan mengendalikan laju kendaraan di dalam komplek andai jaya persada dan juga di perluhan polisi tidur
3	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	jalan Batu Safir raya RT 49 RW 04 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	4 Buah	Perempatan di dalam komplek perumahan perlu cermin cembung untuk keselamatan lalu lintas di dalam komplek perumahan
4	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	Komplek keruing RT 63 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	3 Buah	Untuk keamanan lalu lintas di dalam lingkungan perumahan

	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Banjarmasin			
5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Blok Safir dan Jamrut RT 53 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	4 Buah	Untuk keamanan lalu lintas di dalam lingkungan perumahan
6	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Batu merah dan Nilam RT 51 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	4 Buah	Untuk keamanan lalu lintas di dalam lingkungan perumahan
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Jalan Sungai Andai Komplek Andai Jaya Persada Blok D,E,F,G,H RT 34, 35 dan 36 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	8 Buah	Untuk memantau dan mengendalikan laju kendaraan di didalam komplek andai jaya persada selain kaca cermin cembung juga di perlukan Polisi tidur agar kecepatan kendaraan

					tidak terlalu laju
8	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Jalan Mutiara Raya Komplek Keruing RT 63 dan RT 64 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	6 Buah	komplek yang banyak simpang 4 perlu cermin cembung untuk keamanan lalu lintas di dalam komplek keruing RT 63 dan RT 64
9	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Jalan Batu Safir raya Blok Batu Safir dan Jamrut RT 53 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Abnajarasin Utara, Kota Banjarmasin	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	4 Buah	Diperlukan Cermin cembung di perempatan komplek perumahan untuk keselamatan lalu lintas di dalam komplek perumahan blok batu safir dan Jamrut RT 53 Sungai Andai
10	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan cermin cembung di tikungan	Jalan Batu Safir Raya Blok Batu Merah dan Nilam RT 51 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	4 Buah	Untuk keselamatan lalu lintas di perempatan komplek perumahan batu merah dan Nilam RT 51 kelurahan sungai andai

11	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penerangan jalan	JL. Ampera Raya Gg. Ampera 3 Ujung RT.38 RW.03 Kel. Basirih Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	8 Buah	Di jalan tersebut saat ini kondisinya apabila malam sangat gelap sehingga menimbulkan kerawanan terjadinya tindakan kriminal
12	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jl. Belitung Darat Gg. Melati RT.27 & RT.28 kel kuin cerucuk kec banjarmasin barat, Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	8 Buah	Jalan yang ada apabila malam hari gelap
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	jalan Batu Safir Raya RT 49 RW 01 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	3 Buah	Perlunya penerangan jalan umum di kompleks perumahan
14	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Komp Sungai Andai Komplek Keruing RT 63 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	4 Buah	Perlunya penerangan jalan umum di kompleks perumahan
15	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan	Batu merah, nilam 2 dan	Persentase penerangan	3 Buah	Perlunya penerangan

	Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	nilam 3 RT 51 Sungai Andai Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin	jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu		jalan umum di kompleks perumahan
16	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan mutiara raya komplek keruing RT 63 dan RT 64 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banajrmasin Utara	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	6 Buah	Lampu Penerangan PJU di dalam KOmplek yang masih kurang
17	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)/ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	Jalan Batu Safir Raya Blok Batu Merah, Blok Nilam 2 dan Blok Nilam 3 RT 51 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara	Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu	4 Buah	Lampu penerangan jalan yang masih kurang di komplek perumahan Blok Batu merah, nilam 2 dan nilam 3 RT 51 Sungai Andai

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEBIJAKAN**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Pembangunan Nasional di Bidang Perhubungan, Pemerintah telah melakukan pembinaan dan pengawasan melalui penyusunan Standar Pelayanan Minimal guna untuk menjamin akses mutu pelayanan dasar kepada masyarakat dan agar penyelenggaraan kinerja Pemerintah Daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 19 Tahun 2017 tanggal 21 Februari 2017.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

##### **1. Meningkatnya pelayanan infrastruktur inklusif bidang perhubungan**

Sasarannya adalah :

- Meningkatnya konektivitas kota
- Menurunnya rasio kecelakaan lalu lintas
- Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum
- Meningkatnya dermaga/Pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan

##### **2. Terwujudnya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan**

Sasarannya adalah:

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan SKPD

#### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin tahun anggaran 2024 yaitu :

##### **A. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

1. Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin
  8. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program Pengelolaan Pelayaran
1. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
- C. Program Penunjang Urusan Pemerinyahan Daerah
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan:

Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 Misi RPJMD Kota Banjarmasin 2021-2026, Dari enam misi tersebut, misi yang berkaitan dengan Topuksi Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

Visi: Banjarmasin BAIMAN dan Lebih Bermartabat.			
<b>Misi 4 Meningkatkan kualitas pengelolaan infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang dan lingkungan</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan infrastruktur Inklusif bidang perhubungan	Menurunnya Rasio Kecelakaan Lalu Lintas Per 10.000 Keberangkatan	Mengoptimalkan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoptimalan Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Lalu Lintas</li> <li>• Meningkatkan Disiplin Berlalu Lintas</li> <li>• Menurunkan titik/lokasi parkir liar serta pengoptimalan pemasangan perlengkapan dan fasilitas pendukung jalan</li> </ul>
	Meningkatnya Konektivitas Kota	Meningkatkan Penggunaan Angkutan Umum Massal Trans Banjarmasin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum</li> <li>• Peningkatan dan Penambahan Armada Angkutan Umum Trans Banjarmasin</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Angkutan Melalui Pemberian Bimbingan</li> </ul>

			<p>Penyelenggaraan Pengangkutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pengawasan Monitoring dan Pengendalian Terhadap Angkutan Jalan</li> </ul>
	<p>Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang terkoneksi dengan Shelter angkutan umum</p>	<p>Meningkatkan Penggunaan Angkutan Sungai yang Terintegrasi dengan Angkutan Darat</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan dan Penambahan Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai</li> <li>• Penyediaan Angkutan Sungai</li> <li>• Pengembangan Dermaga atau Pelabuhan Sungai Agar Dapat Diakses Oleh Semua Masyarakat Kota Banjarmasin</li> <li>• Melakukan Pengawasan, Pengoperasian, dan Pengendalian Terhadap Angkutan Sungai</li> </ul>
	<p>Meningkatnya Dermaga/Pelabuhan Sungai yang Memenuhi Standar Keselamatan dan Keamanan</p>	<p>Mengoptimalkan dan Mengembangkan Dermaga/Pelabuhan Sungai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Dermaga/Pelabuhan Sungai Agar Memenuhi Standar Keamanan dan Keselamatan</li> <li>• Peningkatan Pelayanan Dermaga/Pelabuhan Sungai</li> <li>• Melakukan Pemeliharaan Rutin</li> </ul>

			Dermaga Beserta Fasilitasnya dan Pembangunan Dermaga Beserta Fasilitasnya
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan SKPD		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pengawasan dan Evaluasi Terhadap Realisasi Program Kerja Dinas Perhubungan</li> <li>• Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perhubungan</li> </ul>

\* Ketersediaan dana bukanlah factor yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan SDGs, karena anggaran yang prioritas adalah mengutamakan alokasi kegiatan yang lebih mendesak dan sangat perlu. Pencapaian SDGs dapat dilakukan dengan beberapa hal adalah sebagai berikut:

<b>Ciri-ciri</b>	<b>Model lama</b>	<b>Model SDGs</b>
Ketepatan waktu pelaksanaan anggaran	Terlambat	Tepat waktu
Penyerapan anggaran	Rendah	Sesuai rencana
Data dan Informasi Anggaran	Tertutup	Terbuka
Akuntabilitas anggaran	Rendah	Tinggi

\* Pelaksanaan Program Kegiatan Prioritas yang merupakan pendukung Pemerintah Daerah, yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat keberhasilan dapat dilihat pada tabel berikut :

Data Penumpang Angkutan Pelajar Tahun 2022

<b>No</b>	<b>Bulan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Wanita</b>	<b>Total</b>
1	Januari	5.443	4.637	10.080
2	Februari	3.434	2.927	6.361
3	Maret	2.870	2.445	5.315
4	April	177	151	328
5	Mei	2.897	2.468	5.365
6	Juni	3.810	3.247	7.057
7	Juli	2.638	2.248	4.886
8	Agustus	6.043	5.149	11.192
9	September	5.325	4.537	9.862
10	Oktober	5.274	4.494	9.768
11	Nopember	5.550	4.728	10.278
12	Desember	3.049	2.598	5.647

Data Penumpang Trans Banjarmasin Tahun 2022

No	Bulan	Laki-Laki	Wanita	Total
1	Januari	11.980	3.994	15.974
2	Februari	9.867	5.795	15.662
3	Maret	10.523	8.964	19.487
4	April	16.397	8.447	24.844
5	Mei	14.644	10.177	24.821
6	Juni	14.284	8.389	22.673
7	Juli	11.716	15.531	27.247
8	Agustus	15.697	12.843	28.540
9	September	13.956	10.106	24.062
10	Oktober	13.158	14.255	27.413
11	Nopember	11.640	13.665	25.305
12	Desember	13.864	11.811	25.675

\* Untuk pencapaian standar Pelayanan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Angkutan Sungai Yang Terdaftar menurut Jenis Angkutan Kapal

NO	JENIS ANGKUTAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1.	Motor Getek / Klotok	60 buah	5 buah
2.	Tug Boat / Kapal Tunda	5 buah	1 buah
3.	Speed Boat	44 buah	24 buah
4.	LCT	-	-
5.	SPOB	-	-
6.	Tongkang	-	-
7.	Kapal Motor	21 buah	4 buah

Data Kapal Tahun 2022 Yang Melakukan Registrasi

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH DATA KAPAL 2021	REGIS TRASI	<5	05-10	11-20	21-30	31-50	51-100	101-200	201-300	301-500	501-1000	≥1000
1	MG	60	9	42	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	TB	5	0	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SB	44	10	43	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	LCT	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SPOB	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TKG	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	KM	21	4	12	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	130	23	99	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**TC. 33**  
**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kota Banjarmasin**  
**Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin**

Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Ket
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber dana		Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BJM			PAD				
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	BJM			PAD				
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	BJM	85	79.163.453.822	PAD		85	68.981.634.050	



		<b>Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		
		<b>Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan</b>	<b>BJM</b>	<b>0</b>				<b>0</b>		
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>342.672.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>206.027.256</b>	
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	BJM	2 Dokumen	342.672.000	PAD		2 Dokumen	206.027.256	
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>33.570.974.009</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>33.594.392.436</b>	
		<b>Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		
		<b>Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>				<b>100%</b>		

2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	BJM	1 Unit	22.857.404.506	PAD	Pemasangan APJ baru + pembangunan gedung Baru UPTD PJU	1 Unit	27.422.227.878	
		Kwh Penerangan Jalan yang dibayarkan		296 ID Panel				296 ID Panel		
		Titik Lampu yang dipasang dan ditingkatkan		160 Titik				160 Titik		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	BJM	2 Unit	6.213.622.253	PAD	Penambahan jumlah APJ yg dipelihara dan ditingkatkan	2 Unit	4.936.001.018	
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	BJM	100 Unit	4.499.947.100	PAD	Penambahan Marka Jalan	100 Unit	1.236.163.540	
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>4.605.968.217</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>659.287.220</b>	
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	BJM		0				0	

2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	1 Unit	3.537.622.617	PAD	Intergrasi nol Km supaya 1 tahap	1 Unit	82.410.902	
2.15.02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	BJM	1 Unit	328.200.000	PAD	Menyesuaikan anggaran pembangunan supaya 1 tahap		0	
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	BJM	1 Unit	740.145.600	PAD		1 Unit	576.876.318	
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan Parkir</b>	<b>BJM</b>	<b>25</b>	<b>2.438.846.100</b>	<b>PAD</b>		<b>25</b>	<b>1.236.163.540</b>	
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	BJM	12 Laporan	2.438.846.100	PAD	Penambahan Mobil patroli UPTD	900 Laporan	1.236.163.540	

<b>2.15.02.2.05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi</b>	<b>BJM</b>	<b>88%</b>	<b>6.511.085.692</b>	<b>PAD</b>		<b>88%</b>	<b>1.854.245.306</b>	
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	BJM	1 Unit	4.402.452.522	PAD	Pengadaan Alat Ketuk Uji	1 Unit	782.903.575	
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	BJM	24 Orang	437.095.200	PAD		24 Orang	82.410.902	
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	BJM	11.700 Unit	54.020.000	PAD		11700 Unit	41.205.451	
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	10.000 Dokumen	149.990.400	PAD	Stock klartu uji (Smart card)	23400 Dokumen	206.027.256	
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan	BJM	3.840 Laporan	354.788.000	PAD		3.800 Laporan	41.205.451	

		Bermotor								
2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	BJM	1 Laporan	50.000.000	PAD		1 Laporan	41.205.451	
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	BJM	1 Unit	1.038.155.570	PAD	Kalibrasi, Pemeliharaan kalibrasi, Pengerukan halamam	1 Unit	576.876.318	
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	10 Laporan	24.584.000	PAD		10 Laporan	82.410.902	
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM		0				0	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan	BJM	20 Laporan	0	PAD		20 Laporan	0	

		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor								
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin	BJM	100%	16.589.336.100	PAD		100%	12.641.832.474	
		Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin	BJM	100%				100%		
		Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi	BJM	100%				100%		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	BJM	12 Laporan	5.705.061.900	PAD		12 Laporan	5.851.174.092	

2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	10 Dokumen	1.723.860.000	PAD	Penambahan sosialisasi, target indikator 48 kegiatan	10 Dokumen	716.974.853	
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	9 Laporan	169.418.000	PAD		9 Laporan	57.687.632	
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	BJM	12 Dokumen	8.490.996.200	PAD	Pembangunan Gedung tahap 2 Gedung cc room, ATCS 2 unit, spped bump, cermin tikungan	12 Dokumen	5.233.092.322	
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	BJM	3 Laporan	500.000.000	PAD		3 Laporan	782.903.575	
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>205.770.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>24.723.271</b>	

	<b>Banjarmasin</b>	<b>Banjarmasin</b>								
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	BJM		0	PAD			0	
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	BJM	10 Laporan	99.730.000	PAD		10 Laporan	16.482.181	
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	BJM	10 Laporan	106.040.000	PAD		10 Laporan	8.241.090	
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Rasio Konektivitas Kota</b>	<b>BJM</b>	<b>38,46%</b>	<b>14.898.801.701</b>	<b>PAD</b>		<b>38,46%</b>	<b>18.764.962.547</b>	
		<b>Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang</b>		<b>2 Trayek</b>				<b>2 Trayek</b>		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau	BJM	12 Laporan	1.848.668.805	PAD	Penambahan Gps Tracer untuk control, kamera penghitung penumpang,	12 Laporan	1.747.111.137	



		Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					MDVR			
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	BJM	22 Unit	13.050.132.899	PAD	Penambahan BUS 10 UNIT	22 Unit	17.017.851.410	
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>11.904.079.780</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>18.400.000.000</b>	
		<b>Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum (%)</b>								
2.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan	BJM	100%	11.904.079.780	PAD		100%	18.400.000.000	

	<b>Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>	<b>Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau</b>								
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	BJM	3 Unit	4.125.544.000	PAD		3 Unit	11.000.000.000	
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	BJM	3 Unit	1.402.649.680	PAD		3 Unit	600.000.000	
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BJM	12 Laporan	6.375.886.100	PAD		12 Laporan	6.800.000.000	
<b>2.15.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai LHE AKIP</b>	<b>BJM</b>	<b>BB</b>	<b>21.436.910.936</b>	<b>PAD</b>		<b>BB</b>	<b>18.989.477.679</b>	
		<b>Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>			<b>100%</b>			
		<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)</b>	<b>BJM</b>	<b>Sangat Baik</b>			<b>Sangat Baik</b>			
		<b>Tingkat kualitas perencanaan perangkat</b>	<b>BJM</b>	<b>Sangat Baik</b>			<b>Sangat Baik</b>			

		daerah (kategori)								
<b>2.15.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>33.887.500</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>28.631.704</b>	
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BJM	8 Dokumen	24.892.500	PAD		8 Dokumen	20.996.583	
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BJM	12 Laporan	8.995.000	PAD		12 Laporan	7.635.121	
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>11.412.000.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>14.813.110.980</b>	
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BJM	83 Orang	11.400.000.000	PAD		83 Orang	14.801.658.299	
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BJM	12 Dokumen	12.000.000	PAD		12 Dokumen	11.452.681	
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>19.596.200</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>17.352.548</b>	

2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	1 Dokumen	0	PAD		1 Dokumen	0	
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	1 Dokumen	19.596.200	PAD		1 Dokumen	17.352.548	
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>441.620.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>176.752.192</b>	
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BJM	1 Paket	141.620.000	PAD		1 Paket	161.335.672	
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BJM	25 Orang	300.000.000	PAD		25 Orang	15.416.520	
<b>2.15.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>2.486.220.836</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>984.550.584</b>	
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BJM	1 Paket	24.925.000	PAD		1 Paket	23.859.753	

2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BJM	2 Paket	0			2 Paket	0	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BJM	1 Paket	89.545.936	PAD		1 Paket	19.087.802	
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BJM	1 Paket	902.826.400	PAD		1 Paket	119.298.767	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BJM	1 Paket	97.463.500	PAD		1 Paket	19.087.803	
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BJM	4 Dokumen	10.980.000	PAD		4 Dokumen	11.452.682	
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BJM	12 Laporan	102.500.000	PAD		12 Laporan	75.720.209	
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BJM	12 Laporan	1.257.980.000	PAD		12 Laporan	572.634.081	
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>870.257.800</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>386.990.499</b>	

	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>								
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BJM	20 unit	21.164.000	PAD		20 unit	17.352.547	
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BJM	3 Unit	395.272.800	PAD		3 Unit	75.289.981	
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BJM	2 Unit	108.680.000	PAD		2 Unit	250.966.602	
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BJM	1 Unit	0			1 Unit	0	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BJM	1 Unit	345.141.000	PAD		1 Unit	43.381.369	
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>2.369.136.000</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1.035.417.857</b>	

1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BJM	12 Laporan	733.200.000	PAD		12 Laporan	711.020.650	
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BJM	13 Laporan	1.635.936.000	PAD		13 Laporan	324.397.207	
<b>2.15.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>3.714.192.600</b>	<b>PAD</b>		<b>100%</b>	<b>1.690.080.803</b>	
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BJM	7 Unit	99.786.600	PAD		7 Unit	477.195.067	
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BJM	30 Unit	2.736.480.000	PAD		30 Unit	715.792.602	

2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BJM	20 Unit	0			20 Unit	0	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BJM	130 Unit	119.750.000	PAD		130 Unit	43.381.370	
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BJM	2 Unit	251.888.000	PAD		2 Unit	238.597.534	
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BJM	3 Unit	251.888.000	PAD		3 Unit	143.409.487	
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BJM	1 Unit	254.400.000	PAD		1 Unit	71.704.743	



**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 yang merupakan revisi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Dinas Perhubungan. Rencana Kerja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program dan Kegiatan yang ada pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 Indikator kinerja ada 3 (tiga) Program dan 17 ( Tujuh Belas) Kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 112.414.444.538,- (Seratus Dua Belas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Empat Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) dan Sumber Dana berasal dari APBD Kota Banjarmasin.

Program dan Kegiatan untuk 3 Program dan 17 Kegiatan dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini:

**Tabel 5.1**  
**Kerangka Pendanaan dan Program Kegiatan**  
**Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024**

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sum ber dana
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	TERSELENGGARANYA URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	BJM			PAD
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terpenuhinya Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	BJM			PAD
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	BJM	85	79.163.453.822	PAD
		Persentase Terpenuhinya PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	BJM	100%		
		Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 10.000 Keberangkatan	BJM	0		
2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kota Banjarmasin	BJM	100%	342.672.000	PAD
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	BJM	2 Dokumen	342.672.000	PAD
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Perlengkapan Jalan di Jalan Kota Banjarmasin	BJM	100%	33.570.974.009	PAD

		<b>Persentase penerangan jalan yang dikelola oleh sistem manajemen kinerja cahaya/lampu</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>		
		<b>Persentase penerangan jalan yang telah dipugar dan yang baru dipasang</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>		
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	BJM	1 Unit	22.857.404.656	PAD
		Kwh Penerangan Jalan yang dibayarkan		296 ID Panel		
		Titik Lampu yang dipasang dan ditingkatkan		160 Titik		
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	BJM	2 Unit	6.213.622.253	PAD
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	BJM	100 Unit	4.499.947.100	PAD
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Terlaksananya Pengelolaan Terminal yang Optimal dan Terintegrasi</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>4.605.968.217</b>	<b>PAD</b>
2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	BJM		0	
2.15.02.2.03.07	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	BJM	1 Unit	3.537.622.617	PAD
2.15.02.2.03.09	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	BJM	1 Unit	328.200.000	PAD
2.15.02.2.03.11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang	BJM	1 Unit	740.145.600	PAD

	Penunjang)	terehabilitasi dan terpelihara				
2.15.02.2.04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase Penerbitan Izin dan Penyelenggaraan Parkir</b>	<b>BJM</b>	<b>25</b>	<b>2.438.846.100</b>	<b>PAD</b>
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	BJM	12 Laporan	2.438.846.100	PAD
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi</b>	<b>BJM</b>	<b>88%</b>	<b>6.511.085.692</b>	<b>PAD</b>
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	BJM	1 Unit	4.402.452.522	PAD
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	BJM	24 Orang	437.095.200	PAD
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	BJM	11.700 Unit	54.020.000	PAD
2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	10.000 Dokumen	149.990.400	PAD
2.15.02.2.05.05	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	3.840 Laporan	354.788.000	PAD

2.15.02.2.05.06	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	BJM	1 Laporan	50.000.000	PAD
2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	BJM	1 Unit	1.038.155.570	PAD
2.15.02.2.05.08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	10 Laporan	24.584.000	PAD
2.15.02.2.05.09	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM		0	
2.15.02.2.05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	BJM	20 Laporan	0	PAD
2.15.02.2.06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan di Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>16.589.336.100</b>	<b>PAD</b>
		<b>Terselenggaranya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan di Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>		
		<b>Terselenggaranya Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Teknologi Informasi</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>		
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	BJM	12 Laporan	5.705.061.900	PAD

2.15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	10 Dokumen	1.723.860.000	PAD
2.15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	BJM	9 Laporan	169.418.000	PAD
2.15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	BJM	12 Dokumen	8.490.996.200	PAD
2.15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten /Provinsi	BJM	3 Laporan	500.000.000	PAD
2.15.02.2.07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>Persentase Terlaksananya Persetujuan Hasil Andalalin Jalan Kota Banjarmasin</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>205.770.000</b>	<b>PAD</b>
2.15.02.2.07.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	BJM		0	PAD
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	BJM	10 Laporan	99.730.000	PAD
2.15.02.2.07.06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	BJM	10 Laporan	106.040.000	PAD

2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Konektivitas Kota	BJM	38,46%	14.898.801.704	PAD
		Persentase Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang		2 Trayek		
2.15.02.2.09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	BJM	12 Laporan	1.848.668.805	PAD
2.15.02.2.09.03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	BJM	22 Unit	13.050.132.899	PAD
2.15.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan (%)	BJM	100%	11.904.079.780	PAD
		Persentase dermaga/pelabuhan sungai yang terkoneksi dengan shelter angkutan umum (%)				
2.15.03.2.13.	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	BJM	100%	11.904.079.780	PAD
2.15.03.2.13.02	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	BJM	3 Unit	4.125.544.000	PAD

2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	BJM	3 Unit	1.402.649.680	PAD
2.15.03.2.13.10	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	BJM	12 Laporan	6.375.886.100	PAD
2.15.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Nilai LHE AKIP</b>	<b>BJM</b>	<b>BB</b>	<b>21.346.910.936</b>	<b>PAD</b>
		<b>Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>		
		<b>Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan administrasi kesekretariatan (kategori)</b>	<b>BJM</b>	<b>Sangat Baik</b>		
		<b>Tingkat kualitas perencanaan perangkat daerah (kategori)</b>	<b>BJM</b>	<b>Sangat Baik</b>		
2.15.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen penganggaran, perencanaan dan evaluasi kinerja SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>33.887.500</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	BJM	8 Dokumen	24.892.500	PAD
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	BJM	12 Laporan	8.995.000	PAD
2.15.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi keuangan SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>11.412.000.000</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BJM	83 Orang	11.400.000.000	PAD
2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	BJM	12 Dokumen	12.000.000	PAD



2.15.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>19.596.200</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	1 Dokumen	0	PAD
2.15.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	BJM	1 Dokumen	19.596.200	PAD
2.15.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya administrasi kepegawaian SKPD</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>441.620.000</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	BJM	1 Paket	141.620.000	PAD
2.15.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	BJM	25 Orang	300.000.000	PAD
2.15.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>2.486.220.836</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	BJM	1 Paket	24.925.000	PAD
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BJM	2 Paket	0	
2.15.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	BJM	1 Paket	89.545.936	PAD
2.15.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BJM	1 Paket	902.826.400	PAD
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	BJM	1 Paket	97.463.500	PAD

2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BJM	4 Dokumen	10.980.000	PAD
2.15.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	BJM	12 Laporan	102.500.000	PAD
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BJM	12 Laporan	1.257.980.000	PAD
<b>2.15.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>870.257.800</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	BJM	20 unit	21.164.000	PAD
2.15.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	BJM	3 Unit	395.272.800	PAD
2.15.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BJM	2 Unit	108.680.000	PAD
2.15.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	BJM	1 Unit	0	
2.15.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	BJM	1 Unit	345.141.000	PAD
<b>2.15.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>2.369.136.000</b>	<b>PAD</b>
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air	BJM	12 Laporan	733.200.000	PAD

		dan Listrik yang Disediakan				
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BJM	13 Laporan	1.635.936.000	PAD
2.15.01.2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>BJM</b>	<b>100%</b>	<b>3.714.192.600</b>	<b>PAD</b>
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BJM	7 Unit	99.786.600	PAD
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	BJM	30 Unit	2.736.480.000	PAD
2.15.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	BJM	20 Unit	0	
2.15.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	BJM	130 Unit	119.750.000	PAD
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	BJM	2 Unit	251.888.000	PAD
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	BJM	3 Unit	251.888.000	PAD
2.15.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara	BJM	1 Unit	254.400.000	PAD

		/Direhabilitasi				
--	--	-----------------	--	--	--	--

Program Prioritas Tahun 2024 Dinas Perhubungan yaitu Mengintegrasikan transportasi sungai dan transportasi darat yang inklusif agar dapat diakses oleh semua warga, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Program	Sub Kegiatan	Ruang Lingkup	Anggaran Yang Dibutuhkan
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Menetapkan Lokasi Titik Integrasi Moda Darat dan Sungai	3.537.622.617
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Penataan Parkir di Kawasan Integrasi	2.438.846.100
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penambahan Koridor/Trayek Trans Banjarmasin	13.050.132.899
Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Membangun lokasi titik integrasi yang inklusif	11.000.000.000
Program Pengelolaan Pelayaran	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Membangun lokasi titik integrasi yang inklusif	600.000.000

## **BAB V PENUTUP**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 merupakan agenda tahunan Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2021 – 2026, serta prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin Tahun 2024 yang telah disusun merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA BANJARMASIN,

**H. SLAMET BEGJO, A.TD, MT**

Pembina Tk. I

NIP. 19670119 199203 1 006